



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 3839-3855

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Kantor Samsat Makassar II Sudiang)

Astrivo Timba Bulawan, Yusti, Sita Yubelina Sabandar, Arnold Sau

Program Studi Akuntansi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Kristen Indonesia Paulus

[astrivotimbabulawan@gmail.com](mailto:astrivotimbabulawan@gmail.com), [kristinayusti863@gmail.com](mailto:kristinayusti863@gmail.com), [tikupasangsita@gmail.com](mailto:tikupasangsita@gmail.com), [arnoldsau@gmail.com](mailto:arnoldsau@gmail.com)

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), khususnya pada kendaraan roda dua, di Kantor Samsat Makassar II Sudiang. Keterlambatan pembayaran PKB masih menjadi permasalahan serius karena berdampak langsung pada penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menghambat efektivitas perencanaan pembangunan daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 100 wajib pajak sepeda motor yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Variabel independen yang dianalisis meliputi tingkat pendapatan, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan Samsat, sanksi pajak, serta aksesibilitas layanan pembayaran, sedangkan variabel dependen adalah keterlambatan pembayaran PKB. Data dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur dan dianalisis menggunakan uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji t, dan uji F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Tingkat pendapatan yang rendah, kesadaran dan pengetahuan perpajakan yang kurang, persepsi sanksi pajak yang lemah, kualitas pelayanan yang belum optimal, serta keterbatasan aksesibilitas layanan pembayaran terbukti meningkatkan kecenderungan wajib pajak untuk menunda pembayaran PKB. Secara simultan, seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Temuan ini menegaskan pentingnya sinergi antara peningkatan edukasi perpajakan, perbaikan kualitas pelayanan publik, optimalisasi layanan digital Samsat, serta penegakan sanksi pajak yang konsisten guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan menekan tingkat keterlambatan pembayaran PKB di daerah perkotaan.*

*Kata kunci: Pajak Kendaraan Bermotor, Keterlambatan Pembayaran, Kepatuhan Wajib Pajak, Pelayanan Samsat, Aksesibilitas Layanan*

### 1. Latar Belakang

Persaingan bisnis yang semakin ketat di era globalisasi dan ketidakpastian ekonomi menuntut perusahaan untuk tidak hanya berorientasi pada pencapaian laba akuntansi, tetapi juga pada kemampuan menciptakan nilai tambah ekonomi yang berkelanjutan bagi pemegang saham. Kinerja keuangan menjadi indikator utama dalam menilai keberhasilan perusahaan dalam mengelola sumber daya dan modal yang dimiliki secara efisien (Fahmi, 2020). Namun, pengukuran kinerja keuangan yang hanya bertumpu pada rasio keuangan konvensional sering kali belum mampu mencerminkan nilai ekonomis yang sesungguhnya, karena belum memperhitungkan biaya modal secara eksplisit (Brigham & Houston, 2019).

Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat provinsi. Salah satu jenis pajak daerah yang memiliki kontribusi signifikan terhadap PAD adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), seiring dengan meningkatnya jumlah kepemilikan kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor. Meskipun pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui penyederhanaan prosedur dan inovasi layanan pembayaran, permasalahan keterlambatan pembayaran PKB masih menjadi isu yang cukup serius di berbagai daerah di Indonesia.

Keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor berdampak langsung pada menurunnya potensi penerimaan daerah serta menghambat efektivitas perencanaan anggaran pemerintah daerah. Fenomena ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor belum optimal. Berbagai penelitian sebelumnya menyatakan bahwa perilaku keterlambatan pembayaran pajak dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tingkat kesadaran dan pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan publik, persepsi terhadap sanksi pajak, serta kemudahan akses layanan pembayaran (Putri & Hidayat, 2020; Pratiwi & Lestari, 2021; Nurdin & Saputra, 2022).

Fenomena keterlambatan pembayaran PKB juga terjadi di Kantor Samsat Makassar II Sudiang. Berdasarkan data Samsat Makassar II Sudiang, jumlah sepeda motor yang terdaftar mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun peningkatan tersebut tidak diikuti oleh kepatuhan pembayaran pajak yang proporsional. Kondisi ini tercermin dari persentase keterlambatan pembayaran PKB yang cenderung meningkat selama periode 2021–2024, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

**Tabel 1.** Fenomena Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Sepeda Motor) di Samsat Makassar II Sudiang

Tahun	Jumlah Sepeda Motor Terdaftar	Membayar Tepat Waktu	Menunggak Pajak	Persentase Keterlambatan
2021	215.340	162.780	52.560	24,40%
2022	228.910	169.420	59.490	25,99%
2023	241.670	176.350	65.320	27,03%
2024	256.480	184.670	71.810	28,00%

Sumber: Samsat Makassar II Sudiang (2025)

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa meskipun jumlah sepeda motor terdaftar meningkat setiap tahun, persentase kendaraan yang menunggak pajak juga mengalami kenaikan secara konsisten. Hal ini mengindikasikan adanya permasalahan struktural dan perilaku wajib pajak yang perlu dikaji lebih mendalam. Keterlambatan pembayaran PKB tidak dapat dipandang sebagai persoalan administratif semata, melainkan merupakan hasil interaksi antara kondisi ekonomi wajib pajak, tingkat kesadaran dan pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan Samsat, efektivitas sanksi pajak, serta aksesibilitas layanan pembayaran yang tersedia.

## Urgensi Penelitian

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi karena keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor berimplikasi langsung pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan efektivitas kebijakan perpajakan daerah. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keterlambatan pembayaran PKB secara empiris, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran, khususnya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperbaiki kualitas pelayanan Samsat, serta mengoptimalkan pemanfaatan layanan pembayaran berbasis digital.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji pengaruh tingkat pendapatan, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan Samsat, sanksi pajak, dan aksesibilitas layanan pembayaran terhadap keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada wajib pajak sepeda motor di Kantor Samsat Makassar II Sudiang, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai faktor-faktor penentu keterlambatan pembayaran PKB.

## 2. Metode Penelitian

### 2.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan rancangan penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan dan pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengujian hipotesis yang dirumuskan berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, serta dianalisis menggunakan teknik statistik inferensial. Rancangan asosiatif memungkinkan peneliti untuk menjelaskan secara empiris pengaruh tingkat pendapatan, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan Samsat, sanksi pajak, dan aksesibilitas layanan pembayaran terhadap keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Creswell & Creswell, 2018).

## 2.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor roda dua yang terdaftar dan melakukan aktivitas pembayaran pajak di Kantor Samsat Makassar II Sudiang. Mengingat jumlah populasi yang besar dan tidak dapat ditentukan secara pasti dalam periode penelitian, maka penentuan sampel dilakukan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik ini dipilih dengan pertimbangan bahwa responden yang dipilih harus memenuhi kriteria tertentu agar sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu wajib pajak yang memiliki sepeda motor minimal selama satu tahun, berusia minimal 17 tahun, serta pernah atau sedang melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Berdasarkan kriteria tersebut, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden, yang dinilai telah memenuhi syarat kecukupan sampel untuk analisis regresi linear berganda dalam penelitian sosial (Sugiyono, 2019; Hair et al., 2020).

## 2.3 Teknik Pengumpulan Data

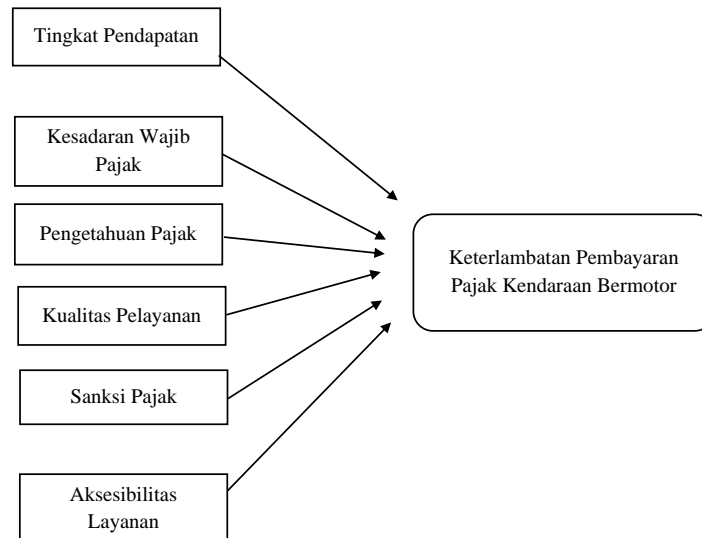
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner terstruktur yang disusun berdasarkan indikator masing-masing variabel penelitian. Kuesioner menggunakan skala Likert lima poin untuk mengukur persepsi responden terhadap tingkat pendapatan, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan Samsat, sanksi pajak, aksesibilitas layanan pembayaran, serta keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Sebelum digunakan dalam penelitian, instrumen terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitasnya untuk memastikan bahwa setiap pernyataan mampu mengukur konstruk yang diteliti secara tepat dan konsisten. Uji validitas dilakukan melalui korelasi antara skor item dan skor total, sedangkan uji reliabilitas menggunakan nilai Cronbach's Alpha dengan batas minimum 0,70 sebagai indikator reliabilitas yang baik (Ghozali, 2021).

## 2.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap dengan menggunakan bantuan perangkat lunak statistik. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden dan kecenderungan jawaban responden terhadap masing-masing variabel penelitian. Selanjutnya, dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas guna memastikan bahwa data memenuhi persyaratan untuk dilakukan analisis regresi linear berganda. Pengujian hipotesis dilakukan melalui analisis regresi linear berganda, uji t untuk mengetahui pengaruh parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, serta uji F untuk menguji pengaruh variabel independen secara simultan terhadap keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 5 persen ( $\alpha = 0,05$ ), yang umum digunakan dalam penelitian bidang ekonomi dan sosial (Hair et al., 2020).

## 2.5 Kerangka Berpikir dan Hipotesis

Kerangka berpikir dalam penelitian ini disusun berdasarkan teori kepatuhan pajak yang menyatakan bahwa perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh faktor ekonomi, psikologis, dan administratif. Tingkat pendapatan mencerminkan kemampuan ekonomi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak, sedangkan kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan merepresentasikan aspek sikap dan pemahaman wajib pajak terhadap pentingnya pajak. Di sisi lain, kualitas pelayanan Samsat, sanksi pajak, dan aksesibilitas layanan pembayaran menggambarkan peran pemerintah dalam menciptakan sistem perpajakan yang efektif dan mendorong kepatuhan. Interaksi antara seluruh variabel tersebut diasumsikan memengaruhi perilaku wajib pajak, baik dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor tepat waktu maupun mengalami keterlambatan pembayaran, sehingga kerangka berpikir penelitian ini menempatkan keenam variabel independen tersebut sebagai faktor penentu keterlambatan pembayaran PKB.



**Gambar 1.** Kerangka Konseptual  
*Sumber: Konsepsi pribadi penulis (2025)*

Berdasarkan kerangka berpikir dan landasan teori yang telah diuraikan, hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

**H1:** Tingkat pendapatan berpengaruh terhadap keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Makassar II (Sudiang).

**H2:** Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Makassar II (Sudiang).

**H3:** Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Makassar II (Sudiang).

**H4:** Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Makassar II (Sudiang).

**H5:** Sanksi pajak berpengaruh terhadap keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Makassar II (Sudiang).

**H6:** Aksesibilitas layanan berpengaruh terhadap keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Makassar II (Sudiang).

### 3. Hasil dan Diskusi

#### 3.1 Karakteristik Responden

**Tabel 2.** Karakteristik Responden Penelitian

Karakteristik	Kategori	Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin	Laki-laki	62	62%
	Perempuan	38	38%
Usia	< 20 tahun	3	3%
	20–29 tahun	24	24%
	30–39 tahun	35	35%
	40–49 tahun	26	26%
	≥ 50 tahun	12	12%

<b>Pendidikan Terakhir</b>	SD	5	5%
	SMP	12	12%
	SMA/SMK	41	41%
	Diploma	15	15%
	S1	22	22%
	S2/S3	5	5%
<b>Pekerjaan</b>	Pelajar/Mahasiswa	9	9%
	Karyawan Swasta	34	34%
	PNS/TNI/Polri	18	18%
	Wiraswasta	24	24%
	Ibu Rumah Tangga	11	11%
	Lainnya	4	4%
<b>Pendapatan Bulanan</b>	< Rp 1.000.000	6	6%
	Rp 1.000.000–2.499.000	21	21%
	Rp 2.500.000–3.999.000	29	29%
	Rp 4.000.000–5.999.000	27	27%
	≥ Rp 6.000.000	17	17%
<b>Total Responden</b>		<b>100</b>	<b>100%</b>

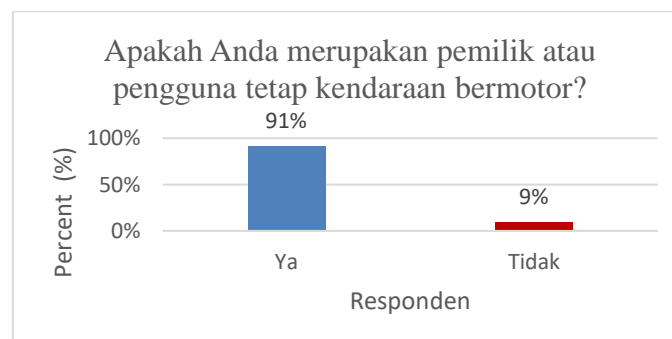
Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer (2025)

Berdasarkan Tabel 2, karakteristik responden penelitian menunjukkan bahwa wajib pajak kendaraan bermotor yang melakukan pembayaran di Kantor Samsat Makassar II Sudiang didominasi oleh responden berjenis kelamin laki-laki, yaitu sebesar 62%, sedangkan responden perempuan sebesar 38%. Dari sisi usia, mayoritas responden berada pada kelompok usia produktif, khususnya usia 30–39 tahun (35%), diikuti usia 40–49 tahun (26%) dan 20–29 tahun (24%), yang mengindikasikan bahwa pembayaran pajak kendaraan lebih banyak dilakukan oleh masyarakat yang telah memiliki stabilitas ekonomi dan tanggung jawab administratif.

Dilihat dari tingkat pendidikan, responden didominasi oleh lulusan SMA/SMK (41%), diikuti lulusan S1 (22%) dan Diploma (15%), yang menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak memiliki latar belakang pendidikan menengah hingga tinggi. Kondisi ini berpotensi memengaruhi pemahaman responden terhadap kewajiban perpajakan, meskipun tidak secara otomatis menjamin kepatuhan pembayaran pajak tepat waktu.

Berdasarkan jenis pekerjaan, responden terbanyak berasal dari kelompok karyawan swasta (34%), wiraswasta (24%), serta PNS/TNI/Polri (18%), yang mencerminkan bahwa mayoritas wajib pajak merupakan pekerja aktif dengan penghasilan tetap atau usaha mandiri. Sementara itu, dari sisi pendapatan, responden didominasi oleh kelompok pendapatan menengah, khususnya Rp 2.500.000–3.999.000 (29%) dan Rp 4.000.000–5.999.000 (27%). Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden secara ekonomi memiliki kemampuan yang relatif memadai untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor, sehingga keterlambatan pembayaran pajak tidak semata-mata disebabkan oleh keterbatasan pendapatan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor perilaku dan sistem pelayanan.

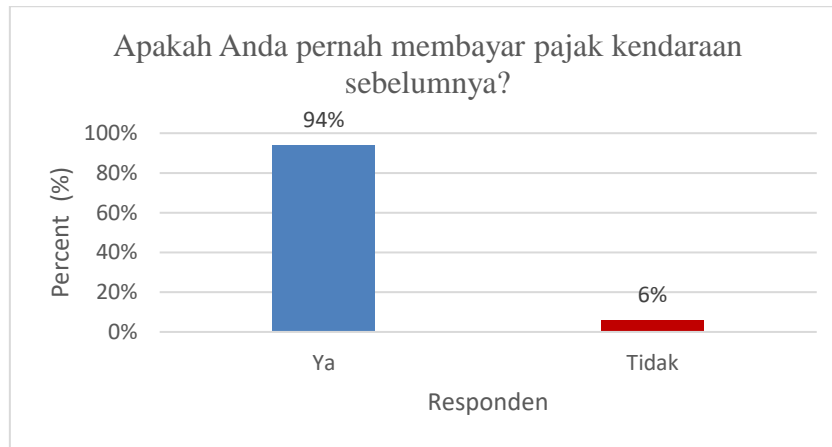
### Kepemilikan kendaraan bermotor responden



Gambar 2. Persentase Kepemilikan Kendaraan Bermotor Responden  
 Sumber Data: data olahan SPSS (2025)

Berdasarkan grafik tersebut, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden merupakan pemilik atau pengguna tetap kendaraan bermotor, yaitu sebesar 91%, sedangkan responden yang bukan pemilik atau pengguna tetap hanya sebesar 9%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas pengunjung Kantor Samsat Makassar II Sudiang yang menjadi responden penelitian memiliki keterkaitan langsung dengan kepemilikan atau penggunaan kendaraan bermotor, sehingga relevan untuk dijadikan sumber data dalam menilai kepatuhan dan perilaku pembayaran pajak kendaraan.

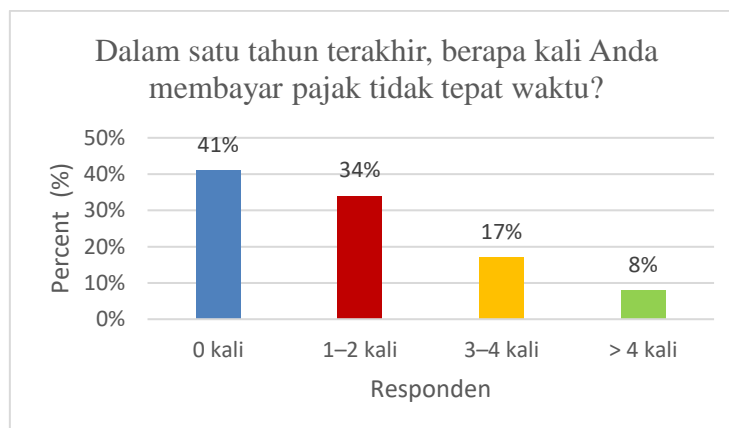
### Pajak Kendaraan



**Gambar 3.** Persentase Pajak Kendaraan  
*Sumber Data: data olahan SPSS (2025)*

Berdasarkan grafik tersebut, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden (94%) pernah membayar pajak kendaraan sebelumnya, sedangkan hanya 6% responden yang belum pernah membayar pajak kendaraan. Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas wajib pajak yang datang ke Kantor Samsat Makassar II Sudiang telah memiliki pengalaman dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan, sehingga responden penelitian didominasi oleh wajib pajak yang relatif familiar dengan prosedur dan sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor.

### Pajak Tidak Tepat Waktu



**Gambar 4.** Persentase Pajak Tepat Waktu  
*Sumber Data: data olahan SPSS (2025)*

Berdasarkan grafik tersebut, terlihat bahwa 41% responden tidak pernah terlambat membayar pajak kendaraan dalam satu tahun terakhir. Namun, masih terdapat 34% responden yang mengalami keterlambatan sebanyak 1-2 kali, 17% responden terlambat 3-4 kali, dan 8% responden terlambat lebih dari 4 kali. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar responden tergolong cukup patuh, tingkat keterlambatan pembayaran pajak kendaraan masih relatif tinggi pada sebagian wajib pajak, sehingga diperlukan upaya peningkatan kepatuhan agar pembayaran pajak dapat dilakukan tepat waktu.

### Alasan Utama Keterlambatan Pembayaran Pajak



**Gambar 5.** Persentase Alasan Utama Keterlambatan Pembayaran Pajak  
 Sumber Data: data olahan SPSS (2025)

Berdasarkan grafik tersebut, dapat diketahui bahwa alasan utama keterlambatan pembayaran pajak kendaraan adalah lupa, dengan persentase sebesar 31%. Selanjutnya, faktor ekonomi menjadi alasan keterlambatan bagi 28% responden, diikuti oleh kesibukan dengan persentase 23%. Sementara itu, kendala sistem menyumbang 12%, dan alasan lainnya merupakan yang paling sedikit yaitu 6%. Hasil ini menunjukkan bahwa keterlambatan pembayaran pajak kendaraan lebih banyak disebabkan oleh faktor perilaku dan kondisi pribadi dibandingkan dengan kendala teknis, sehingga diperlukan upaya seperti pengingat pembayaran dan peningkatan kemudahan layanan untuk mengurangi tingkat keterlambatan.

### 3.2 Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

**Tabel 3.** Deskriptif Responden Berdasarkan Variabel Penelitian

Variabel	Item	STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)	Jumlah
Keterlambatan Pembayaran Pajak (Y)	Y.1	0	20	50	30	0	100
	Y.2	0	25	60	15	0	100
	Y.3	0	5	55	40	0	100
	Y.4	0	15	46	34	5	100
Tingkat Pendapatan (X1)	X1.1	0	0	30	41	29	100
	X1.2	0	0	30	51	19	100
	X1.3	0	0	50	41	9	100
	X1.4	19	51	30	0	0	100
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	X2.1	0	0	10	60	30	100
	X2.2	0	0	30	41	29	100
	X2.3	0	0	0	70	30	100
	X2.4	0	0	29	42	29	100
Pengetahuan Perpajakan (X3)	X3.1	0	0	29	41	30	100
	X3.2	0	0	30	41	29	100
	X3.3	0	0	10	60	30	100
	X3.4	0	0	29	42	29	100
Kualitas Pelayanan (X4)	X4.1	0	19	30	41	10	100
	X4.2	0	19	30	41	10	100
	X4.3	0	0	59	36	5	100
	X4.4	0	29	41	21	9	100
Sanksi Pajak (X5)	X5.1	0	20	49	21	10	100
	X5.2	0	29	51	20	0	100
	X5.3	0	0	59	31	10	100
	X5.4	0	29	51	20	0	100
Aksesibilitas dan Fasilitas Pembayaran (X6)	X6.1	0	19	30	41	10	100
	X6.2	0	29	40	21	10	100
	X6.3	0	0	70	30	0	100
	X6.4	0	29	40	21	10	100

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer (2025)

Berdasarkan Tabel 3, variabel keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor (Y) menunjukkan bahwa jawaban responden didominasi oleh kategori netral dan setuju pada seluruh indikator. Hal ini mengindikasikan bahwa keterlambatan pembayaran pajak masih tergolong sedang, di mana sebagian responden belum sepenuhnya konsisten dalam melakukan pembayaran pajak tepat waktu. Keberadaan responden pada kategori setuju dan sangat setuju, khususnya pada indikator yang berkaitan dengan perhatian terhadap jatuh tempo pembayaran, menunjukkan bahwa masalah keterlambatan masih perlu mendapatkan perhatian serius dari pihak terkait.

Pada variabel tingkat pendapatan (X1), mayoritas responden berada pada kategori setuju dan sangat setuju pada sebagian besar indikator, yang menunjukkan bahwa pendapatan bulanan responden secara umum dinilai cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor. Namun demikian, pada indikator yang berkaitan dengan penundaan pembayaran karena alasan keuangan, responden justru didominasi oleh kategori tidak setuju, yang mengindikasikan bahwa faktor pendapatan bukan merupakan penyebab utama keterlambatan pembayaran pajak.

Selanjutnya, variabel kesadaran wajib pajak (X2) memperlihatkan tingkat persetujuan yang sangat tinggi. Sebagian besar responden menyatakan setuju dan sangat setuju terhadap pernyataan yang berkaitan dengan kewajiban membayar pajak serta manfaat pajak bagi pembangunan. Meskipun demikian, masih terdapat sebagian responden yang berada pada kategori netral, yang menunjukkan bahwa tingkat kesadaran belum sepenuhnya merata pada seluruh aspek kewajiban perpajakan.

Pada variabel pengetahuan perpajakan (X3), tanggapan responden menunjukkan bahwa pemahaman dasar mengenai perpajakan sudah tergolong baik, yang ditandai dengan dominasi jawaban setuju dan sangat setuju. Akan tetapi, proporsi responden yang berada pada kategori netral masih cukup signifikan, yang mengindikasikan adanya ketidakpastian atau keterbatasan pemahaman pada aspek-aspek tertentu dari peraturan perpajakan.

Variabel kualitas pelayanan (X4) menunjukkan persepsi responden yang cenderung moderat. Dominasi jawaban netral pada beberapa indikator mencerminkan bahwa pelayanan yang diberikan belum sepenuhnya dirasakan optimal oleh responden. Aspek kecepatan, kemudahan, dan kejelasan informasi masih memerlukan peningkatan agar dapat mendorong kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Sementara itu, pada variabel sanksi pajak (X5), sebagian besar responden memberikan tanggapan netral, yang menunjukkan rendahnya pemahaman dan keyakinan terhadap efektivitas sanksi keterlambatan pembayaran pajak. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sanksi pajak belum sepenuhnya dipersepsikan sebagai faktor yang kuat dalam mendorong kepatuhan wajib pajak.

Terakhir, variabel aksesibilitas dan fasilitas pembayaran (X6) juga didominasi oleh jawaban netral dan setuju. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun akses dan fasilitas pembayaran pajak dinilai cukup memadai, masih terdapat keraguan terkait kemudahan, fleksibilitas waktu, serta kelengkapan metode pembayaran yang tersedia. Dengan demikian, peningkatan kualitas sistem dan fasilitas pembayaran diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

### 3.3 Analisis Data

#### 3.3.1 Analisis Bivariat

##### a. Uji Normalitas

**Tabel 4.** Uji Normalitas

Variabel	Kolmogorov-Smirnov Statistic	df	Sig.	Shapiro-Wilk Statistic	df	Sig.
Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor	0.140	100	<0.001	0.934	100	<0.001
Tingkat Pendapatan	0.388	100	<0.001	0.764	100	<0.001

Kesadaran Wajib Pajak	0.278	100	<0.001	0.825	100	<0.001
Pengetahuan Perpajakan	0.228	100	<0.001	0.841	100	<0.001
Kualitas Pelayanan	0.161	100	<0.001	0.925	100	<0.001
Sanksi Pajak	0.167	100	<0.001	0.900	100	<0.001
Aksesibilitas dan Fasilitas Pembayaran	0.125	100	<0.001	0.918	100	<0.001

*Sumber Data: data olahan SPSS (2025)*

Berdasarkan Tabel 4 hasil output spss Uji Normalitas, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel penelitian meliputi Keterlambatan Pembayaran Pajak, Tingkat Pendapatan, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, serta Aksesibilitas dan Fasilitas Pembayaran berdistribusi tidak normal. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi (Sig.) 0,000 pada kedua uji (Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk), yang berada di bawah tingkat signifikansi  $\alpha = 0,05$ . Oleh karena data tidak memenuhi asumsi normalitas, analisis statistik parametrik tidak dapat digunakan, sehingga dalam penelitian ini metode non-parametrik seperti analisis korelasi Spearman akan diterapkan untuk menguji hubungan antar variabel.

### Hubungan Tingkat Pendapatan dengan Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

**Tabel 5.** Hubungan Tingkat Pendapatan dengan Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Variabel	Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor	Tingkat Pendapatan
Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor	1.000	0.720**
Sig. (2-tailed)	–	< 0.001
N	100	100
Tingkat Pendapatan	0.720**	1.000
Sig. (2-tailed)	< 0.001	–
N	100	100

Keterangan:

\*\* Korelasi signifikan pada taraf 0,01 (2-tailed)

*Sumber Data: data olahan SPSS (2025)*

Berdasarkan hasil analisis hubungan antara tingkat pendapatan dengan keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor, diperoleh nilai signifikansi (Sig. 2-tailed) sebesar  $< 0,001$  dengan jumlah responden sebanyak 100 orang. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari batas signifikansi yang ditetapkan, yaitu 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendapatan dan keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Hasil ini menunjukkan bahwa perbedaan tingkat pendapatan responden berhubungan dengan kecenderungan terjadinya keterlambatan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara tingkat pendapatan dengan keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat diterima, sedangkan hipotesis nol ditolak.

### Hubungan Kesadaran Wajib Pajak dengan Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

**Tabel 6.** Hubungan Kesadaran Wajib Pajak dengan Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Variabel	Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor	Kesadaran Wajib Pajak
Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor	1.000	0.904**
Sig. (2-tailed)	–	< 0.001
N	100	100
Kesadaran Wajib Pajak	0.904**	1.000
Sig. (2-tailed)	< 0.001	–
N	100	100

*Keterangan:*

\*\* Korelasi signifikan pada taraf 0,01 (2-tailed).

*Sumber Data:* data olahan SPSS (2025)

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 6 mengenai hubungan antara kesadaran wajib pajak dengan keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor, diperoleh nilai signifikansi (Sig. 2-tailed) sebesar < 0,001 dengan jumlah responden sebanyak 100 orang. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kesadaran wajib pajak dan keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Temuan ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak berperan dalam memengaruhi ketepatan waktu pembayaran pajak kendaraan bermotor, di mana semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka kecenderungan terjadinya keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor semakin rendah. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara kesadaran wajib pajak dengan keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor diterima, sedangkan hipotesis nol ditolak.

### Hubungan Pengetahuan Perpajakan dengan Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

**Tabel 7.** Hubungan Pengetahuan Perpajakan dengan Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Variabel	Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor	Pengetahuan Perpajakan
Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor	1.000	0.904**
Sig. (2-tailed)	–	< 0.001
N	100	100
Pengetahuan Perpajakan	0.904**	1.000
Sig. (2-tailed)	< 0.001	–
N	100	100

*Keterangan:*

\*\* Korelasi signifikan pada taraf 0,01 (2-tailed).

*Sumber Data:* data olahan SPSS (2025)

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 7, diperoleh nilai signifikansi (Sig. 2-tailed) sebesar <0.001 dengan jumlah responden sebanyak 100 orang. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan perpajakan dengan keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan berperan dalam memengaruhi ketepatan waktu pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara pengetahuan perpajakan dan keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor diterima, sedangkan hipotesis nol ditolak.

### Hubungan Kualitas Pelayanan dengan Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

**Tabel 8.** Hubungan Kualitas Pelayanan dengan Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Variabel	Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor	Kualitas Pelayanan
Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor	1.000	0.793**
Sig. (2-tailed)	–	< 0.001
N	100	100
Kualitas Pelayanan	0.793**	1.000
Sig. (2-tailed)	< 0.001	–
N	100	100

Keterangan:

\*\* Korelasi signifikan pada taraf 0,01 (2-tailed).

Sumber Data: data olahan SPSS (2025)

Berdasarkan Tabel 8 yang menyajikan hasil analisis hubungan antara kualitas pelayanan dengan keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor, diperoleh nilai signifikansi (Sig. 2-tailed) sebesar < 0,001 dengan jumlah responden sebanyak 100 orang. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kualitas pelayanan dan keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Hasil ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diterima wajib pajak memiliki keterkaitan dengan perilaku ketepatan waktu dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian, hipotesis penelitian yang menyatakan adanya hubungan antara kualitas pelayanan dengan keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor diterima, sedangkan hipotesis nol ditolak.

### Hubungan Sanksi Pajak dengan Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

**Tabel 9.** Sanksi Pajak Pelayanan dengan Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Variabel	Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor	Sanksi Pajak
Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor	1.000	0.839**
Sig. (2-tailed)	–	< 0.001
N	100	100
Sanksi Pajak	0.839**	1.000
Sig. (2-tailed)	< 0.001	–
N	100	100

Keterangan:

\*\* Korelasi signifikan pada taraf 0,01 (2-tailed)

Sumber Data: data olahan SPSS (2025)

Berdasarkan Tabel 9 mengenai hubungan sanksi pajak dengan keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor, diperoleh nilai signifikansi (Sig. 2-tailed) sebesar < 0,001 dengan jumlah responden sebanyak 100 orang. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara sanksi pajak dan keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Hasil ini menunjukkan bahwa keberadaan dan penerapan sanksi pajak memiliki keterkaitan dengan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak tepat waktu. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara sanksi pajak dan keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor diterima, sedangkan hipotesis nol ditolak.

## Hubungan Aksesibilitas dan Fasilitas Pembayaran dengan Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

**Tabel 10.** Hubungan Aksesibilitas dan Fasilitas Pembayaran dengan Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Variabel	Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor	Aksesibilitas dan Fasilitas Pembayaran
Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor	1.000	0.792**
Sig. (2-tailed)	–	< 0.001
N	100	100
Aksesibilitas dan Fasilitas Pembayaran	0.792**	1.000
Sig. (2-tailed)	< 0.001	–
N	100	100

Keterangan:

\*\* Korelasi signifikan pada taraf 0,01 (2-tailed)

Sumber Data: data olahan SPSS (2025)

Berdasarkan Tabel 10 mengenai hubungan aksesibilitas dan fasilitas pembayaran dengan keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor, diperoleh nilai signifikansi (Sig. 2-tailed) sebesar <0,001 dengan jumlah responden sebanyak 100 orang. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara aksesibilitas dan fasilitas pembayaran dengan keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Hasil ini menunjukkan bahwa kemudahan akses dan kelengkapan fasilitas pembayaran memiliki keterkaitan dengan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak tepat waktu. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara aksesibilitas dan fasilitas pembayaran dengan keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor diterima, sedangkan hipotesis nol ditolak.

### b. Analisis Regresi Linear Berganda

#### Regresi Linear Berganda

**Tabel 11.** Regresi Linear Berganda

Variabel Independen	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
(Constant)	0.939	0.294	–	3.190	0.002
Tingkat Pendapatan	-1.069	0.192	-0.533	-5.575	<0.001
Kesadaran Wajib Pajak	2.276	0.384	2.383	5.932	<0.001
Pengetahuan Perpajakan	-1.058	0.326	-1.265	-3.243	0.002
Kualitas Pelayanan	-0.984	0.204	-1.315	-4.820	<0.001
Sanksi Pajak	0.164	0.263	0.191	0.622	0.536
Aksesibilitas dan Fasilitas Pembayaran	1.092	0.413	1.402	2.644	0.010

Sumber Data: data olahan SPSS (2025)

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda pada Tabel 11, diperoleh persamaan regresi yang menunjukkan bahwa tingkat pendapatan, pengetahuan perpajakan, dan kualitas pelayanan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, yang berarti semakin baik kondisi ekonomi, pemahaman pajak, dan mutu pelayanan Samsat, maka keterlambatan pembayaran cenderung menurun. Sebaliknya, kesadaran wajib pajak serta aksesibilitas dan fasilitas pembayaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterlambatan, mengindikasikan adanya kesenjangan antara kesadaran normatif dan kepatuhan aktual serta potensi moral hazard akibat kemudahan layanan. Sementara itu, sanksi pajak berpengaruh positif namun tidak signifikan, menunjukkan bahwa sanksi yang berlaku belum efektif dalam mendorong kepatuhan pembayaran pajak tepat waktu. Secara keseluruhan, hasil ini menegaskan bahwa faktor ekonomi, kognitif, dan kualitas pelayanan memiliki peran lebih dominan dibandingkan faktor represif dalam memengaruhi keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.6576>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

**Uji T**

**Tabel 12.** Uji T

Variabel	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
(Constant)	0.939	0.294	–	3.190	0.002
Tingkat Pendapatan	-1.069	0.192	-0.533	-5.575	<0.001
Kesadaran Wajib Pajak	2.276	0.384	2.383	5.932	<0.001
Pengetahuan Perpajakan	-1.058	0.326	-1.265	-3.243	0.002
Kualitas Pelayanan	-0.984	0.204	-1.315	-4.820	<0.001
Sanksi Pajak	0.164	0.263	0.191	0.622	0.536
Aksesibilitas dan Fasilitas Pembayaran	1.092	0.413	1.402	2.644	0.010

*Sumber Data: data olahan SPSS (2025)*

Berdasarkan hasil uji parsial (Uji t) pada Tabel 12, diketahui bahwa tingkat pendapatan dan kesadaran wajib pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 ( $< 0,05$ ), yang menunjukkan keduanya berpengaruh signifikan secara parsial terhadap keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Selain itu, pengetahuan perpajakan dan kualitas pelayanan juga terbukti berpengaruh signifikan dengan nilai signifikansi masing-masing sebesar 0,002 dan 0,000 ( $< 0,05$ ), menegaskan bahwa pemahaman perpajakan serta mutu pelayanan Samsat berperan dalam menentukan ketepatan waktu pembayaran pajak. Sebaliknya, sanksi pajak tidak menunjukkan pengaruh signifikan secara parsial dengan nilai signifikansi 0,536 ( $> 0,05$ ), yang mengindikasikan bahwa sanksi belum efektif dalam menekan keterlambatan pembayaran pajak. Sementara itu, aksesibilitas dan fasilitas pembayaran berpengaruh signifikan dengan nilai signifikansi 0,010 ( $< 0,05$ ). Secara keseluruhan, hasil Uji t menunjukkan bahwa lima variabel independen berpengaruh signifikan terhadap keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, sedangkan variabel sanksi pajak tidak memberikan pengaruh yang signifikan.

**Uji F**

**Tabel 13.** Uji F

Model	Sumber	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	32.166	6	5.361	188.222	<0.001
	Residual	2.649	93	0.028		
	Total	34.815	99			

Keterangan:

- Variabel Dependen: Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor
- Prediktor: Aksesibilitas dan Fasilitas Pembayaran, Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak.

*Sumber Data: data olahan SPSS (2025)*

Berdasarkan Tabel 13 hasil Uji F (ANOVA), pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen, yaitu tingkat pendapatan, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, sanksi pajak, serta aksesibilitas dan fasilitas pembayaran, secara simultan berpengaruh terhadap keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 188,222 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis nol ( $H_0$ ) ditolak dan hipotesis alternatif ( $H_1$ ) diterima. Hal ini menandakan bahwa model regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini signifikan secara statistik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Hasil ini menunjukkan bahwa keenam variabel yang diteliti mampu menjelaskan variasi keterlambatan pembayaran pajak secara simultan. Secara keseluruhan, temuan Uji F ini mengindikasikan bahwa model regresi yang dibentuk layak digunakan sebagai alat analisis untuk memprediksi keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan faktor tingkat pendapatan, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, sanksi pajak, serta aksesibilitas dan fasilitas pembayaran.

### **3.4 Pembahasan**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada wajib pajak sepeda motor di Kantor Samsat Makassar II Sudiang dipengaruhi secara signifikan oleh berbagai faktor ekonomi, kognitif, dan administratif. Temuan ini menegaskan bahwa perilaku kepatuhan pajak tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil interaksi kompleks antara kemampuan ekonomi wajib pajak, tingkat pemahaman dan kesadaran terhadap kewajiban perpajakan, serta kualitas sistem dan pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah.

#### **H1: Pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor**

Hasil pengujian menunjukkan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh signifikan terhadap keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, sehingga H1 diterima. Arah pengaruh yang negatif mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan wajib pajak, maka kecenderungan keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor semakin menurun. Secara empiris, temuan ini tercermin dari karakteristik responden yang mayoritas berada pada kelompok pendapatan menengah hingga menengah atas, di mana kelompok dengan pendapatan lebih stabil cenderung memiliki riwayat pembayaran pajak yang lebih tertib dibandingkan responden berpendapatan rendah.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Putri dan Hidayat (2020), Pratiwi dan Lestari (2021), serta Nurdin dan Saputra (2022) yang menyatakan bahwa tingkat pendapatan memengaruhi kemampuan dan prioritas wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Fakta lapangan penelitian ini juga menunjukkan bahwa 28% responden menyatakan faktor ekonomi sebagai alasan keterlambatan pembayaran, yang menguatkan bahwa keterbatasan pendapatan masih menjadi kendala nyata bagi sebagian wajib pajak. Namun demikian, dominasi responden berpendapatan menengah menunjukkan bahwa keterlambatan pembayaran PKB tidak sepenuhnya disebabkan oleh faktor ekonomi, melainkan juga oleh faktor perilaku dan sistem, sehingga memberikan kontribusi empiris baru pada konteks pajak kendaraan bermotor di perkotaan.

#### **H2: Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor**

Berdasarkan hasil analisis, kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor, sehingga H2 diterima. Secara empiris, hal ini tercermin dari hasil deskriptif yang menunjukkan mayoritas responden menyatakan setuju bahwa membayar pajak merupakan kewajiban dan bentuk kontribusi terhadap pembangunan daerah. Namun, tingkat keterlambatan pembayaran masih relatif tinggi, dengan 59% responden mengaku pernah terlambat membayar pajak dalam satu tahun terakhir.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Pratiwi dan Lestari (2021) serta Putra dan Sari (2020) yang menyatakan bahwa kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan, tetapi tidak selalu menjamin pembayaran tepat waktu. Fakta empiris penelitian ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara kesadaran dan perilaku aktual, yang diperkuat oleh temuan bahwa 31% responden menyatakan lupa sebagai alasan utama keterlambatan pembayaran. Dengan demikian, meskipun kesadaran wajib pajak relatif baik, tanpa dukungan sistem pengingat dan kontrol administratif, kesadaran tersebut belum sepenuhnya terinternalisasi dalam tindakan nyata.

#### **H3: Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor, sehingga H3 diterima. Arah pengaruh yang negatif menunjukkan bahwa semakin baik pengetahuan wajib pajak mengenai prosedur, waktu jatuh tempo, dan konsekuensi keterlambatan, maka semakin kecil kemungkinan wajib pajak menunda pembayaran pajak.

Secara empiris, hasil deskriptif menunjukkan bahwa sebagian besar responden berada pada kategori setuju terhadap pernyataan yang berkaitan dengan pemahaman dasar perpajakan. Namun demikian, masih terdapat proporsi responden dengan jawaban netral yang cukup besar, yang menunjukkan adanya keterbatasan pemahaman pada aspek teknis tertentu. Temuan ini sejalan dengan penelitian Tambunan (2019), Nurdin dan Saputra (2022), serta Rahmawati dan Hidayat (2021) yang menegaskan bahwa literasi perpajakan berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan. Kontribusi penelitian ini terletak pada fakta bahwa pengetahuan perpajakan terbukti lebih efektif menekan keterlambatan dibandingkan sanksi pajak, khususnya pada konteks PKB.

#### **H4: Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor**

Hasil pengujian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor, sehingga H4 diterima. Secara empiris, hasil deskriptif menunjukkan dominasi jawaban netral pada beberapa indikator pelayanan, yang menandakan bahwa pelayanan Samsat belum sepenuhnya dirasakan optimal oleh wajib pajak, khususnya terkait kecepatan dan kejelasan informasi.

Temuan ini konsisten dengan penelitian Putri dan Hidayat (2020) serta Wulandari dan Nugroho (2021) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan publik memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak daerah. Fakta lapangan juga menunjukkan bahwa 12% responden menyatakan kendala sistem sebagai alasan keterlambatan pembayaran, yang mengindikasikan bahwa aspek pelayanan dan sistem administrasi masih menjadi hambatan nyata. Penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan tidak hanya berdampak pada kepuasan wajib pajak, tetapi juga berperan strategis dalam menekan keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

#### **H5: Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor**

Berdasarkan hasil uji parsial, sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor, sehingga H5 ditolak. Secara empiris, hasil deskriptif menunjukkan bahwa mayoritas responden memberikan jawaban netral terhadap indikator sanksi pajak, yang mengindikasikan rendahnya persepsi terhadap efektivitas sanksi keterlambatan.

Temuan ini berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Namun, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rahman dan Putri (2021) yang menemukan bahwa sanksi administrasi yang relatif kecil dan jarang ditegakkan secara tegas cenderung tidak memberikan efek jera. Fakta empiris di lapangan menunjukkan bahwa wajib pajak lebih mempertimbangkan kemudahan layanan dan kondisi pribadi dibandingkan ancaman sanksi, sehingga memperkuat *novelty* penelitian ini dalam konteks pajak kendaraan bermotor.

#### **H6: Pengaruh Aksesibilitas Layanan terhadap Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aksesibilitas layanan berpengaruh signifikan terhadap keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor, sehingga H6 diterima. Fakta empiris menunjukkan bahwa sebagian besar responden menilai akses dan fasilitas pembayaran sudah cukup memadai, baik dari segi lokasi maupun metode pembayaran. Namun, kemudahan tersebut justru berpotensi mendorong perilaku menunda pembayaran.

Temuan ini diperkuat oleh fakta lapangan bahwa 23% responden menyatakan kesibukan sebagai alasan keterlambatan, yang menunjukkan bahwa fleksibilitas layanan memberi ruang bagi wajib pajak untuk menunda pembayaran. Hasil ini sejalan dengan penelitian Sari dan Nugroho (2022) yang menemukan bahwa kemudahan layanan tanpa penguatan kontrol dapat memicu *procrastination effect*. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi empiris bahwa peningkatan aksesibilitas perlu diimbangi dengan sistem pengingat dan pembatasan waktu yang tegas agar tidak berdampak negatif terhadap ketepatan waktu pembayaran pajak.

#### **Implikasi Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat teori kepatuhan pajak dengan menunjukkan bahwa kepatuhan pembayaran PKB dipengaruhi oleh kombinasi faktor ekonomi, kognitif, dan sistem pelayanan. Penelitian ini juga menegaskan adanya kesenjangan antara kesadaran dan perilaku aktual, serta keterbatasan efektivitas sanksi dalam konteks pajak daerah. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur perpajakan daerah, khususnya terkait dinamika kepatuhan pajak kendaraan bermotor di wilayah perkotaan.

#### **Implikasi Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dan pengelola Samsat untuk tidak hanya mengandalkan sanksi pajak, tetapi lebih fokus pada peningkatan kualitas pelayanan, edukasi perpajakan, serta penguatan sistem pengingat pembayaran berbasis digital. Optimalisasi layanan pembayaran perlu disertai mekanisme kontrol yang mendorong pembayaran tepat waktu, seperti notifikasi jatuh tempo dan insentif

kepatuhan. Dengan demikian, kebijakan yang bersifat persuasif dan sistemik diharapkan mampu menekan tingkat keterlambatan pembayaran PKB dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara berkelanjutan.

#### 4. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada wajib pajak sepeda motor di Kantor Samsat Makassar II Sudiang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan pembayaran PKB merupakan fenomena yang dipengaruhi oleh kombinasi faktor ekonomi, kognitif, dan administratif, sehingga tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan kemampuan finansial semata. Temuan ini sejalan dengan tujuan penelitian untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai determinan perilaku keterlambatan pembayaran pajak daerah. Secara parsial, tingkat pendapatan, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, serta aksesibilitas dan fasilitas pembayaran terbukti berpengaruh signifikan terhadap keterlambatan pembayaran PKB. Dengan demikian, hipotesis H1, H2, H3, H4, dan H6 dinyatakan diterima. Tingkat pendapatan, pengetahuan perpajakan, dan kualitas pelayanan menunjukkan pengaruh negatif, yang mengindikasikan bahwa semakin baik kondisi ekonomi, pemahaman pajak, dan mutu pelayanan Samsat, maka kecenderungan keterlambatan pembayaran PKB semakin menurun. Sebaliknya, kesadaran wajib pajak dan aksesibilitas layanan justru menunjukkan pengaruh positif terhadap keterlambatan pembayaran, yang mengindikasikan adanya kesenjangan antara kesadaran normatif dan perilaku aktual, serta potensi penundaan pembayaran akibat fleksibilitas layanan yang tinggi. Temuan ini menunjukkan bahwa kesadaran dan kemudahan akses, tanpa disertai mekanisme pengendalian dan pengingat yang efektif, belum tentu mendorong kepatuhan pembayaran tepat waktu. Sementara itu, sanksi pajak tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap keterlambatan pembayaran PKB, sehingga hipotesis H5 ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa sanksi administrasi yang berlaku belum dipersepsikan sebagai faktor yang memberikan efek jera bagi wajib pajak. Dengan demikian, faktor persuasif dan sistem pelayanan terbukti lebih dominan dibandingkan pendekatan represif dalam memengaruhi perilaku pembayaran pajak kendaraan bermotor. Secara simultan, seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap keterlambatan pembayaran PKB, yang menegaskan bahwa model penelitian yang dibangun telah sesuai dengan tujuan penelitian. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat teori kepatuhan pajak dengan menekankan pentingnya interaksi antara faktor ekonomi, kognitif, dan sistem pelayanan. Secara praktis, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa peningkatan kepatuhan pembayaran PKB lebih efektif dilakukan melalui edukasi perpajakan, perbaikan kualitas pelayanan, dan penguatan sistem pembayaran berbasis digital yang terintegrasi dengan mekanisme pengingat dan kontrol waktu. Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian hanya dilakukan pada satu lokasi, yaitu Kantor Samsat Makassar II Sudiang, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasi secara luas pada seluruh wilayah atau karakteristik wajib pajak yang berbeda. Kedua, data yang digunakan bersumber dari kuesioner dengan pendekatan persepsi responden, sehingga masih berpotensi mengandung bias subjektivitas. Selain itu, penelitian ini belum memasukkan faktor psikologis dan sosial lainnya, seperti kepercayaan terhadap pemerintah atau norma sosial, yang kemungkinan turut memengaruhi perilaku keterlambatan pembayaran pajak. Saran Penelitian Selanjutnya: Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas lokasi dan jumlah sampel agar hasil penelitian memiliki daya generalisasi yang lebih kuat. Selain itu, peneliti berikutnya dapat mengombinasikan pendekatan kuantitatif dengan kualitatif untuk menggali lebih dalam motif dan perilaku wajib pajak. Penambahan variabel lain, seperti kepercayaan publik terhadap pemerintah, efektivitas sistem pengingat digital, serta faktor budaya dan sosial, juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kepatuhan dan keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

#### Referensi

1. Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2019). *Fundamentals of financial management* (15th ed.). Cengage Learning.
2. Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
3. Fahmi, I. (2020). *Analisis kinerja keuangan*. Alfabeta.
4. Ghozali, I. (2021). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 26* (10th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
5. Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2020). *Multivariate data analysis* (8th ed.). Cengage Learning.
6. Nurdin, N., & Saputra, R. (2022). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 7(2), 85–96.
7. Pratiwi, N. P. A., & Lestari, P. E. (2021). Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(5), 1234–1246.
8. Putra, R. A., & Sari, D. P. (2020). Kesadaran wajib pajak dan pengaruhnya terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, 4(1), 45–56.
9. Putri, A. R., & Hidayat, R. (2020). Kualitas pelayanan dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*,

- 5(2), 112–121.
10. Rahman, F., & Putri, L. M. (2021). Efektivitas sanksi pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak daerah. *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan*, 3(1), 67–78.
  11. Rahmawati, S., & Hidayat, T. (2021). Literasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 14(2), 98–109.
  12. Samsat Makassar II Sudiang. (2025). *Data keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor tahun 2021–2024*. Samsat Makassar II Sudiang.
  13. Sari, D. P., & Nugroho, A. (2022). Kemudahan layanan pajak dan perilaku penundaan pembayaran pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(1), 55–66.
  14. Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
  15. Tambunan, T. (2019). *Perekonomian Indonesia: Teori dan temuan empiris*. Ghalia Indonesia.
  16. Wulandari, R., & Nugroho, Y. A. (2021). Pengaruh kualitas pelayanan publik terhadap kepatuhan pajak daerah. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 5(2), 89–101.